

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Muhammad Sofyan et al, "Hukum Acara Pidana," Edisi ketiga, (2014), hlm. 73-74, Universitas Hasanuddin
- Andi Muhammaf Sofyan, Nur Azisa, "Hukum Pidana Indonesia," Edisi pertama, 2023, hlm 37, Universitas Hasanuddin
- Anggraini, M. (2023). *Pengaturan Kejahatan Digital di Indonesia: Studi Kasus Deepfake dan Pornografi*. Surabaya: Airlangga University Press, p. 158.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, hlm. 79-81
- Bahasa, T. p. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Budi, H. (2022). *Cyber Crime and Law Enforcement*. Malang: Setara Press, p. 97.
- Cindy Natalia dan I Wayan Bela Siki Layang, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake dalam Konteks Hukum Indonesia," Jurnal Kertha Desa Vol. 12, No. 5 (2024).
- Dewi, T. (2021). *Digital Privacy and Security Law: A Global Overview*. Jakarta: Konstitusi Press, p. 120.
- Firmansyah, F. (2021). *Hukum Pidana dan Kejahatan Digital di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, p. 120.
- Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," Jurnal Hukum Replik 5, no. 2 (September 2017)
- Harahap, F. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Digital: Perlindungan Korban Kejahatan Teknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 143.
- Huda, M. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Digital*. Jakarta: Rajawali Press, p. 135.
- Jessica Cally Gabriella Delvilly, Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Setelah Operasi, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol. 5, No. 1, April 2024, hlm. 34–43
- Keith Frankish and William M. Ramsey, e. (2014). *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Kurniawan, R. (2022). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 214.

- Memei Apriana, Fransisco, dan Any Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 1 (30 April 2025): 57–75
- Muhammad, S. (2023). *Hukum Pidana dalam Kasus Kejahatan Digital*. Surabaya: Airlangga University Press, p. 110.
- Nur, R. A. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Pakpahan, R. (2021). *Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia*. *Journal of Information System, Informatics and Computing*.
- Paluaran, D. P. (2024). *Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional*. *Jurnal Litigasi Amsir*.
- Prasetyo, A. (2023). *Analisis Perkembangan Teknologi Deepfake dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 146.
- "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik" oleh Evi Deliana HZ, dimuat dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1.
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta kepastian dan keamanan individu dalam masyarakat," *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Hukumonline, hlm. 2.
- Purwanda, S. &. (2021). *Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar*. JUSTISI.
- Rahman, S. (2022). *Teori Hukum Privasi dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama, p. 180.
- Sari, N. (2023). *Hukum Pidana dan Teknologi Digital*. Yogyakarta: UII Press, p. 222.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).
- Spence, C. K. (June 22, 2007). *Seeing the Light: Exploring the Colavita Visual Dominance Effect*.
- Suryana, I. (2023). *Hak Privasi di Dunia Maya: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, p. 101.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi:

Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Kasus Pornografi di Indonesia*, Tesis Magister, Universitas Brawijaya, 2023.

Renata. (2022). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

"Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Deepfake dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," Repository UPN Veteran Jakarta.

"Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Deepfake dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," Repository UPN Veteran Jakarta.

Jurnal:

Cindy Natalia dan I Wayan Bela Siki Layang, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake dalam Konteks Hukum Indonesia*," Kertha Desa, Vol. 12, No. 5, Tahun 2024

"*Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework*," Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 13, No. 3, September 2024.

Emily Chapman, *Unveiling the Threat: AI and Deepfakes' Impact on Women*, Honors Project, Department of Communications and Digital Studies, University of Mary Washington, 30 April 2024, hlm. 1–13.

Jeremiah Maximillian Laza dan Rizky Karo Karo, "*Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology*," *Lex Prospicit* 1, no. 2 (2023), Universitas Pelita Harapan.

Karishma Verma, "*Digital Deception: The Impact of Deepfakes on Privacy Rights*," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Lubis, M. S. (2021). *Implementasi Artificial Intelligence pada system Manufaktur Terpadu*. Universitas Tarumanegara.

Madalaine Christella Seveney et al., "*Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis AI Pada Konten Pornografi*," *Jurnal Justitia* 8, no. 1 (2025): 292, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia, "*Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi*," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021):, Universitas Jambi.

- Muhammad Faqih Faathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, "*Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi*," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022), Universitas Padjadjaran.
- Muhammad Ilman Abidin et al, "*Legal Review of Liability from Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography*," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 2, Desember 2023
- Ramadhan, D. G. (2022). "*Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*". *Universitas Islam Indonesia*.
- Regina Angelika Septi Rahayu, H. S. (2023). *Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network*. SIBATIK JOURNAL.
- Rizgita Nurul Fauzyah et al "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pembuat Video Pornografi Palsu (Deepfake Porn) Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Indonesia," *Lex Veritatis*, Vol. 3, No. 3, November 2024.
- Sarah Amanda Uly Sijabat dan Diana Lukitasari, "*Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*," *Recidive* 13, no. 2 (2024): 119–238, Universitas Sebelas Maret
- Siahaan, A. L. (2022). *Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi*. *Majalah Hukum Nasional*.
- Sindi Ayu Andira dan M. Endriyo Susila, "*Overcoming Deepfake Porn Crimes in Indonesia*," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2024.
- Yolanda Frisky Amelia et al., "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia*," *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9675–9691, Universitas Islam Malang

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024

Sumber Internet:

"Better Protection for Victims Thanks to New Law on Sexually Explicit Deepfakes," GOV.UK, 22 January 2025, <https://www.gov.uk/government/news/better-protection-for-victims-thanks-to-new-law-on-sexually-explicit-deepfakes>.

"Cara Mencegah Penyalahgunaan Deepfake: Tantangan, Solusi, dan Prospek Masa Depan," Authme Blog, <https://authme.com/id/blog/combating-deepfake>.

Frederick Dauer, "Law Enforcement in the Era of Deepfakes," Police Chief Online, 29 Juni 2022, <https://www.policechiefmagazine.org/law-enforcement-era-deepfakes/>.

Government Cracks Down on 'Deepfakes' Creation," GOV.UK, 16 April 2024, <https://www.gov.uk/government/news/government-cracks-down-on-deepfakes-creation>.

Himawan Bayu Aji, "Indonesian Police, Ministry Conduct Cyber Patrols to Detect Deepfakes," ANTARA News, <https://en.antaranews.com/news/342618/indonesian-police-ministry-conduct-cyber-patrols-to-detect-deepfakes>.

LCQ9: Combating Frauds Involving Deepfake," Info.gov.hk, 26 Juni 2024, <https://www.info.gov.hk/gia/general/202406/26/P2024062600192.htm.>

Yuniar A., "Indonesian Government Encourages Ethical AI to Tackle Deepfakes," GovInsider, <https://govinsider.asia/intl-en/article/indonesian-government-encourages-ethical-ai-to-tackle-deepfakes>.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan AKBP Devi Sujana, Kepala Satreskrim, pada tanggal 20 maret 2025

LAMPIRAN**Lampiran 1. 1 Nota Dinas Izin Penelitian**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

NOTA DINAS

Nomor : B/ND - 121 /III/2025/Bag SDM

Kepada : Yth. KASAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
Dari : KABAG SDM POLRESTABES MAKASSAR
Perihal : Izin Penelitian/Wawancara.

1. Rujukan
 - a. Surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor : 01491/UN4.5/PT/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal izin penelitian.
 - b. Lembar Disposisi dari Agenda Kapolrestabes Makassar Nomor : B/477/III/2025/Sium tanggal 18 Maret 2025 perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada KA untuk bersedia menerima dan memfasilitasi mahasiswa (i) Fakultas Hukum UNHAS Makassar, a.n. NAUFAL AHMED PUTRA ARFIN, nomor pokok B011211114, untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGEDITAN KONTEN PORNOGRAFI MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE" di Sat. Reskrim Polrestabes Makassar.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Makassar, 20 Maret 2025

KABAG SDM POLRESTABES MAKASSAR



Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar.